



MENILIK SIKAP WARGA SEKOLAH TERHADAP SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS: STUDI DI SEKOLAH MENENGAH INKLUSI JAKARTA

Adhissa Qonita

Prodi Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, 13220, Indonesia

Email: adhissa.qonita@gmail.com

p-ISSN: 2337-4845

e-ISSN: 2620-7486



<i>Received</i>	<i>Revised</i>	<i>Accepted</i>	<i>Published</i>
07 Maret 2025	17 April 2025	22 April 2025	30 April 2025

Abstract

Based on Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 Pasal 8 Ayat A, all public schools in DKI Jakarta must accept special needs students and conduct inclusive education. The implementation of inclusive schooling practices inextricably connected to the attitudes exhibited by school residents towards students with special needs. Unfortunately, the presence of students with special needs has not been readily accepted by the school community, indicating the underlying issues in the attitudes displayed toward. 105 teachers and 286 students in inclusive secondary schools in DKI Jakarta were included in this study. The measurement tools used were the Chedoke-McMaster Attitudes Toward Children with Handicaps (CATCH) for students and The Multidimensional Attitudes toward Inclusive Education Scale (MATIES) for teachers. The results of the study indicate that most students still exhibit a neutral attitude towards students with special needs. This suggests that while they do not display overtly negative attitudes, they also do not demonstrate clear positive acceptance. Interestingly, teachers' attitudes toward inclusive education appear to be relatively similar to those of the students, as their responses also tend to be neutral—neither explicitly positive nor negative. Although inclusive education in DKI Jakarta area has experienced significant development, the findings of this study indicate that most members of the school community have not yet presented positive attitudes toward students with special needs and inclusive education as envisioned by the government.

Keywords : Special needs students, inclusion, attitudes, inclusion teachers, secondary students

Abstrak

Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 Pasal 8 Ayat A menyebutkan bahwa semua sekolah negeri di wilayah DKI Jakarta harus menerima siswa berkebutuhan khusus dan menjalankan pendidikan inklusi. Berjalannya sekolah inklusi tidak lepas dari sikap yang ditunjukkan warga sekolah terhadap siswa berkebutuhan khusus. Sayangnya, keberadaan siswa berkebutuhan khusus tidak langsung diterima oleh warga sekolah sehingga mengindikasikan adanya isu tentang sikap yang ditunjukkan warga sekolah terhadap siswa berkebutuhan khusus. Studi ini dilakukan kepada 105 guru dan 286 siswa di sekolah menengah inklusi di Jakarta. Alat ukur yang digunakan adalah Chedoke-McMaster Attitudes Toward Children with Handicaps (CATCH) untuk siswa dan multidimensional attitudes toward inclusive education scale (MATIES) untuk guru. Hasil studi menunjukkan bahwa sebagian besar siswa menunjukkan sikap netral kepada siswa berkebutuhan khusus, yang artinya tidak menunjukkan sikap negatif terhadap siswa berkebutuhan khusus namun juga tidak menunjukkan sikap positif. Menariknya, sikap guru terhadap pendidikan inklusi pun tidak terlalu berbeda dengan siswa, yaitu sikapnya cenderung netral, tidak bersikap negatif maupun positif. Meskipun pendidikan inklusi di wilayah DKI Jakarta telah menunjukkan perkembangan pesat, hasil studi ini menunjukkan bahwa sebagian besar warga sekolah di DKI Jakarta belum menunjukkan sikap positif terhadap siswa berkebutuhan khusus ataupun terhadap pendidikan inklusi seperti yang diharapkan pemerintah.

Kata Kunci : Siswa Bekebutuhan Khusus, Inklusi, Sikap, Guru Inklusi, Siswa Menengah

1. Pendahuluan

Seperti yang sudah diketahui berdasarkan Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 dan diperkuat oleh Pasal 5 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan termasuk bagi siswa berkebutuhan khusus. Hal ini mendorong lebih banyak perubahan pandangan dan pemikiran warga Indonesia khususnya dalam segi pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Salah satu perkembangan yang besar terhadap pendidikan anak berkebutuhan khusus juga tertuang dari Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 70 Tahun 2009 yang memberikan upaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, atau yang dikenal sebagai pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi membuka kesempatan pada siswa berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pembelajaran bersama dengan siswa reguler di sekolah umum. Hal ini tentu sangat berbeda dengan sekolah khusus atau biasa disebut sekolah luar biasa (SLB) yang hanya menerima anak berkebutuhan khusus yang memiliki kondisi serupa satu sama lain.

Kehadiran Peraturan Menteri Pendidikan tersebut mendorong DPRD Provinsi DKI Jakarta mewajibkan seluruh sekolah negeri di wilayah DKI Jakarta untuk menjalankan pendidikan inklusi sejak tahun 2022. Kehadiran sekolah inklusi diharapkan dapat mengakomodasi anak-anak berkebutuhan khusus agar mendapatkan hak atas pendidikan yang layak. Berdasarkan Pasal 8 Ayat A Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru di Jakarta, anak-anak berkebutuhan khusus bisa mendaftar di sekolah reguler melalui jalur afirmasi. DPRD Provinsi DKI Jakarta (2022) juga menegaskan bahwa setiap sekolah negeri harus memiliki satu kelas inklusi khusus di setiap tingkatnya untuk mengakomodasi anak-anak berkebutuhan khusus.

Dorongan aturan dan arahan yang diberikan di DKI Jakarta memberi harapan dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus. Transisi sekolah reguler menjadi sekolah inklusi membawa tantangan bagi sekolah dan warganya untuk dapat mengakomodir kebutuhan siswa berkebutuhan khusus (ABK) di wilayah sekolahnya. Namun begitu, kebijakan ini juga menimbulkan kebingungan pada pihak sekolah untuk memenuhi tuntutan tersebut dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kurangnya persiapan yang terstruktur dalam mengelola sekolah inklusi (Dewi, 2017).

Lingkungan sekolah termasuk orang-orang di dalamnya baik guru, siswa, maupun tenaga pendidik diharapkan cukup terbuka dengan perubahan dan bergabungnya siswa ABK di sekolah. Guru diharapkan dapat mendidik, mengayomi, dan membantu siswa di kelas termasuk siswa berkebutuhan khusus (Haekal, 2018). Selain itu, siswa ABK, terutama di usia sekolah menengah, juga menginjak masa remaja sehingga juga memiliki keinginan untuk menghabiskan waktu dengan teman sebayanya (King, 2017), khususnya untuk mencari kebutuhan intimasi dan kepastian akan nilai diri mereka (Santrock, 2019). Oleh sebab itu, siswa ABK memerlukan respon yang positif atas kehadiran mereka baik dari guru dan siswa lain sebagai teman sebaya mereka di sekolah.

Hasanah, Ni'matuzaroh & Nurhamida (2016) menjelaskan bahwa siswa ABK membutuhkan sikap positif dari lingkungan sekolah berupa penerimaan dan kepedulian terhadap kehadiran mereka. Sikap positif yang diperlihatkan lingkungan belajar terhadap pendidikan inklusi dan siswa ABK dianggap sebagai hal yang sangat penting, mendukung, dan mendorong keberhasilan pendidikan inklusi (Heyder, Sudkamp & Steinmayr, 2020). Hanya saja saat ini respon yang diberikan kepada siswa ABK belum tentu positif. Salim, Jesslin & Rumatutur (2022) merangkum bahwa siswa di sekolah menengah masih muncul respon negatif kepada siswa ABK seperti prasangka dan stigma negatif, rendahnya penerimaan, penolakan, sikap menjauhi bahkan perundungan. Respon negatif ini dapat membuat siswa ABK menjadi tidak percaya diri, merasa malu, takut, marah, hingga dapat saja menarik diri dari pergaulannya sehari-hari (Sari & Kurnia, 2022). Respon positif dan negatif terhadap siswa ABK merupakan cerminan dari sikap yang mereka terima dari orang-orang di sekitarnya.

Armstrong (1986) menjelaskan sikap terhadap anak berkebutuhan khusus diartikan sebagai perasaan dan perlakuan individu terhadap anak berkebutuhan khusus. Sikap ini merupakan keyakinan yang dimiliki seseorang sebelum tertampilkan melalui perasaan dan perilaku (Myers & Twenge, 2016). Menurut Rosenberg & Hovland (dalam Avramidis et al., 2000), sikap merupakan gabungan dari reaksi emosional, pengetahuan, dan perilaku terhadap objek tertentu dan dapat berupa hal positif atau negatif terhadap objek tersebut. Menurut Mahat (2008), dimensi kognitif atau pengetahuan adalah persepsi yang dimiliki atau keyakinan terhadap pendidikan inklusi dan siswa ABK, dimensi afektif atau emosional adalah perasaan individu akibat persepsi tersebut, sedangkan dimensi behavior atau perilaku adalah kecenderungan respon perilaku terhadap pendidikan inklusi dan siswa ABK. Sikap positif yang diharapkan terhadap pendidikan inklusi dan siswa ABK dari lingkungan sekolah adalah penerimaan dalam kelas, keyakinan perbedaan karakteristik dan kebutuhan siswa ABK serta harapan dan dukungan terhadap berjalannya pendidikan inklusi (Subban & Sharma, 2006). Sikap positif ini diharapkan dapat dimiliki oleh sekolah inklusi, terutama di wilayah Jakarta yang sudah menerapkan sekolah inklusi sesuai Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021. Sayangnya, keberadaan pendidikan inklusi dan siswa ABK masih cukup awam bagi sekolah reguler, sehingga sikap yang ditunjukkan warga sekolah atas siswa ABK dan pendidikan inklusi belum dapat dipastikan.

2. Metode Penelitian

Partisipan

Dalam studi ini, terdapat dua kelompok partisipan yang dilibatkan, yaitu siswa sekolah menengah inklusi dan guru sekolah menengah inklusi di wilayah DKI Jakarta. Partisipan studi ini terdiri dari 286 siswa sekolah menengah inklusi dan 105 guru sekolah menengah inklusi. Partisipan studi untuk siswa sekolah menengah memiliki karakteristik yaitu: 1) Siswa/siswi SMP/SMA/Sederajat; 2) Bersekolah di Provinsi DKI Jakarta 3) Bersekolah di sekolah inklusi. Partisipan dari kelompok guru yang dilibatkan pada penelitian ini memiliki karakteristik: 1) Guru di sekolah menengah SMP/SMA/Sederajat 2) Mengajar di wilayah Jakarta 3) Mengajar di sekolah inklusi yang menerima siswa ABK. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Teknik *non-probability sampling* dengan metode *convenience sampling*.

Instrumen

Variabel yang diukur dalam studi ini adalah sikap terhadap siswa berkebutuhan khusus dan pendidikan inklusi. Studi ini menggunakan dua alat ukur yang berbeda sesuai dengan konteks siswa dan guru sekolah menengah inklusi di wilayah Jakarta. Instrumen yang digunakan untuk mengukur sikap pada siswa ABK dalam studi ini adalah *Chedoke-McMaster Attitudes Toward Children with Handicaps (CATCH)* yang disusun oleh Armstrong (1986) berdasarkan teori Allport mengenai sikap yang terdiri dari komponen kognitif, afektif dan *behavioral/perilaku*. Instrumen ini diberikan untuk mengukur sikap anak dengan fisik normal kepada anak disabilitas. Instrumen ini memiliki 36 pertanyaan dengan lima pilihan jawaban (sangat tidak setuju-sangat setuju). Instrumen lalu diadaptasi dengan proses uji coba dengan *cronbach's alpha* sebesar 0,875 dan 24 item yang digunakan (masing-masing 8 item/komponen).

Instrumen yang digunakan untuk mengukur sikap guru adalah *Multidimensional Attitudes Toward Inclusive Education Scale (MATIES)* yang dikembangkan oleh Mahat (2008). MATIES terdiri dari 18 item dengan 5 pilihan jawaban yang dikelompokkan dalam tiga dimensi yaitu kognitif, afektif, dan *behavioral/perilaku*, masing-masing dimensi memiliki 6 item. Alat ukur ini lalu diadaptasi kedalam Bahasa Indonesia dan memiliki nilai *cronbach's alpha* sebesar 0,771 (kognitif), 0,764 (afektif), 0,778 (*perilaku*). Dari hasil uji coba terdapat dua item yang tidak digunakan sehingga jumlah item yang digunakan dalam instrumen adalah 16 item.

Analisa Data

Data yang dihasilkan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis statistika yang digunakan ialah analisis deskriptif. Penelitian ini menghasilkan gambaran perhitungan kategorikal yang didapatkan dari skor dari instrumen yang telah diberikan dan diisi oleh partisipan siswa atau guru di sekolah menengah inklusi di Jakarta.

3. Hasil dan Diskusi

Demografi

Tabel 1. Data Demografi

Data Demografi		N	Presentase	
Siswa	Usia			
		12	76	26,65
		13	59	20,6%
		14	33	11,5%
		15	14	4,9%
		16	14	4,9%
		17	77	26,9%
	18	13	4,5%	
Domisili	Jakarta Selatan	145	50,7%	
	Jakarta Timur	120	42%	
	Jakarta Barat	17	5,9%	
	Lainnya	4	1,4%	
Jenjang Sekolah	SMP	159	55,6%	
	SMA	127	44,4%	
Frekuensi Interaksi dengan anak berkebutuhan khusus	Tidak Pernah	36	12,6%	
	Jarang	70	24,5%	
	Terkadang	110	38,5%	
	Sering	70	24,5%	
Anak berkebutuhan khusus di kelas yang sama	Tidak Ada	102	35,7%	
	Ada	184	64,3%	

Guru				
Usia		20-30	26	24,8 %
		31-40	18	17,1 %
		41-50	21	20 %
		51-60	40	38,1 %
Jenis Kelamin		Laki-Laki	32	30,5%
		Perempuan	73	69,5%
Jenjang Mengajar		SMP	69	65,7%
		SMA	36	34,3%
Pengalaman mengajar berkebutuhan khusus Siswa		1-5 Tahun	79	75,2%
		6-10 Tahun	21	20%
		11-15 Tahun	4	3,8%
		16-20 Tahun	1	1 %
Pengalaman mengikuti Inklusi Pelatihan		Pernah	36	34,3%
		Tidak Pernah	69	65,7%

Berdasarkan penyebaran demografis partisipan siswa, hal yang memperlihatkan perbedaan signifikan terlihat dari frekuensi anak-anak yang berinteraksi dengan anak berkebutuhan khusus yaitu 38,5%. Selain itu di kelas mereka juga memiliki anak berkebutuhan khusus sebanyak 64,3%. Selain itu domisili terbanyak adalah Jakarta Selatan 50,7%. Saat ini siswa sekolah menengah yang mengikuti penelitian ini tidak terlalu banyak perbedaan antara siswa SMP dan SMA.

Sedangkan pada data demografis guru memperlihatkan perbedaan pada lebih banyak berusia 51-60 tahun 38,1%, guru Perempuan 69,5%, jenjang mengajarnya adalah SMP 65,7%, pengalaman mengajar 1-5 tahun 75,2% dan tidak pernah mengikuti pelatihan inklusi yaitu 65,75%.

Kategorisasi Sikap

Tabel 2. Kategorisasi Sikap Siswa terhadap Siswa ABK di sekolah inklusi

Kategorisasi	Jumlah	Presentase
Sikap Negatif	38	13,3%
Sikap Netral	215	75,2%
Sikap Positif	33	11,5%

Berdasarkan tabel 2 pada hasil sikap yang ditunjukkan oleh siswa terhadap siswa ABK diambil berdasarkan 3 kategori sikap menurut Doreen & Kurniawati (2018), pembagian rentang skor dilakukan dengan menggunakan mean empirik. Dari hasil tersebut diketahui bahwa kebanyakan sikap siswa sekolah menengah inklusi di Jakarta terhadap Pendidikan inklusi dan siswa ABK adalah netral 75,2%. Hal ini menunjukkan bahwa siswa sebenarnya tidak menentang ataupun sangat mendukung adanya Pendidikan inklusi dan adanya siswa ABK di kelas. Sikap netral juga menunjukkan sikap cenderung hanya menerima arahan sesuai dengan kebijakan sekolah inklusi.

Tabel 3. Kategorisasi Sikap Guru Terhadap Pendidikan Inklusi

Kategorisasi	Jumlah	Presentase
Sikap Positif	52	49,5%
Sikap Negatif	53	50,5%

Sikap yang ditunjukkan oleh guru terhadap Pendidikan inklusi dibagi menjadi dua kategori yaitu sikap positif dan sikap negatif seperti penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Muzdalifah & Billa (2017) sedangkan pembagian kategorisasi ini bagi dengan menggunakan mean empiric. Dari hasil tersebut terlihat bahwa presentase positif dan negatif hampir tidak memiliki perbedaan atau kemungkinan jika dibagi dengan kategori netral akan banyak guru berada di posisi netral. Perbedaan yang kecil ini juga cenderung menunjukkan bahwa masih adanya sikap yang negatif ditunjukkan oleh guru. Sikap negatif inilah yang sebenarnya diharapkan tidak muncul dalam pengajaran berbasis inklusi di sekolah menengah yang sudah diarahkan sesuai peraturan gubernur mengenai sekolah inklusi Jakarta.

4. Diskusi

Dalam penyelenggaraan sekolah inklusi, sikap siswa menjadi salah satu hal penting yang dapat menunjang dan membantu siswa ABK dalam belajar. Hasil studi yang dilakukan didapatkan bahwa kebanyakan siswa menunjukkan sikap yang netral (75,2%). Sikap netral ini menunjukkan bahwa siswa di sekolah inklusi

sebenarnya tidak menunjukkan sikap negatif terhadap siswa ABK, namun mereka juga tidak langsung menerima anak tersebut dalam pertemanan mereka (Hallberg & Klingberg, 2023; dalam Salsabila 2024). Di sisi lain masih adanya sikap negatif terhadap siswa ABK 13,3% menunjukkan bahwa masih ada siswa yang bersikap buruk terhadap kehadiran siswa ABK di sekolahnya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Pendidikan inklusi di lapangan masih belum menunjukkan harapan atau iklim yang ramah terhadap ABK.

Menurut Wang, dkk (2021) frekuensi interaksi seseorang dengan individu berkebutuhan khusus berkorelasi positif dengan sikap orang tersebut terhadap individu berkebutuhan khusus tersebut. Dari hasil diatas dapat diketahui bahwa siswa tidak terlalu sering berinteraksi dengan siswa ABK (tidak pernah sampai jarang) meskipun berada di sekolah inklusi. Beberapa siswa yang mengikuti studi ini tidak memiliki siswa ABK di kelasnya sehingga mereka terkadang kurang menyadari sikap mereka, bahkan kurang menyadari bahwa sekolah mereka sebenarnya adalah sekolah inklusi yang menerima siswa berkebutuhan khusus. Selain interaksi dengan siswa ABK, sikap netral yang ditunjukkan oleh siswa disebabkan kurangnya pengetahuan mereka mengenai anak berkebutuhan khusus dan bagaimana seharusnya mereka bersikap terhadap mereka. Menurut (Fajrianti & Purwanti, 2021), informasi mengenai pendidikan inklusi kepada siswa masih belum lengkap sehingga siswa menjadi bingung apa yang diharapkan lingkungan terhadap mereka. Siswa cenderung mengetahui sikap yang buruk yang tidak boleh dilakukan terhadap siswa lain termasuk siswa berkebutuhan khusus, namun mereka tidak mengetahui sikap positif seperti apa dalam memperlakukan siswa ABK di sekolah mereka.

Dilihat dari sisi data demografi guru dapat disimpulkan bahwa munculnya siswa ABK di lingkungan sekolah regular sudah dialami oleh salah satu guru yang merasa sudah mengajar siswa ABK selama 16-20 tahun. Hal tersebut menegaskan bahwa keberadaan siswa ABK di sekolah regular sebenarnya sudah lebih lama dibandingkan munculnya peraturan penyelenggaraan Pendidikan inklusi. Hanya saja sampai saat ini, dari hasil pengambilan data yang dilakukan meski tidak berbeda jauh, namun guru masih sedikit lebih menunjukkan sikap negatif dibandingkan sikap positif terhadap Pendidikan inklusi yang terdapat siswa ABK. Hal ini diperkuat dengan kondisi di lapangan menunjukkan bahwa guru regular belum memiliki kompetensi untuk dapat melayani ABK dengan baik (Winarsih, 2022). Adanya pendidikan inklusi dan siswa ABK membuat bertambahnya peran guru di kelas. Sehingga guru regular memerlukan kompetensi tambahan seperti pendidikan dan pelatihan terkait anak berkebutuhan khusus agar dapat memenuhi tuntutan pelayanan pembelajaran yang dibutuhkan siswa ABK. Hanya saja di sekolah menengah inklusi di Jakarta kebanyakan guru belum pernah mendapatkan pelatihan terkait kebutuhan khusus siswa (65,7%).

Ditambah lagi hasil studi ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar guru di berbagai sekolah menengah inklusi Jakarta baru berinteraksi dengan siswa ABK 1-5 tahun saja (75,2%). Hal tersebut menyebabkan guru regular mengalami kesulitan dalam memodifikasi kurikulum, menyesuaikan materi dan media pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa ABK (Pardede, 2020). Pengalaman yang belum begitu banyak dalam berhadapan dengan siswa ABK ditambah belum adanya bantuan tambahan kompetensi yang diberikan kepada guru terkait ABK membuat guru berada di posisi yang kurang menguntungkan guna menunjukkan sikap yang diharapkan pada siswa ABK. Hal inilah yang menjadi dasar kebingungan dari sikap guru terhadap pendidikan inklusi dan siswa ABK yang ada di lingkungan sekolah mereka, dimana sebagai pengajar mereka tidak memahami apa yang perlu dilakukan agar siswa ABK di kelas mendapatkan pembelajaran individual yang sesuai dengan karakteristik mereka. Ketidaktahuan dan ketidaksiapan dalam menjalankan pendidikan inklusi inilah yang mungkin membuat sikap guru terhadap pendidikan inklusi belum sepenuhnya positif dan masih cenderung negatif dibandingkan siswa dalam memandang siswa ABK. Hal tersebut belum sesuai dengan harapan penyelenggaraan Pendidikan inklusi dimana sikap yang diharapkan adalah sikap positif. Hal ini dikarenakan kehadiran sikap positif terhadap siswa ABK diperlukan guna membentuk model anti diskriminatif terhadap siswa ABK untuk siswa lain di kelasnya (Rahbini, 2012). Harapannya, guru dapat mengembangkan sikap positif terhadap siswa ABK sehingga pelaksanaan pendidikan inklusi dapat berjalan lebih baik).

5. Kesimpulan

Secara umum, sekolah yang melaksanakan pendidikan inklusi perlu menyesuaikan kebutuhan siswa ABK, termasuk menghadirkan sikap warga sekolah yang positif terhadap kehadirannya. Idealnya, seluruh warga sekolah baik guru, siswa lain, staff kependidikan dan berbagai pihak lain yang terlibat dengan sekolah perlu memiliki sikap positif terhadap keberadaan siswa ABK di sekolah yang telah ditetapkan sebagai sekolah inklusi. Hanya saja, dalam kenyataannya sikap yang ditunjukkan oleh siswa masih cenderung netral. Sedangkan sikap terhadap Pendidikan inklusi yang ditunjukkan oleh guru sedikit lebih negatif dibandingkan positif. Sikap netral pada siswa sendiri menimbulkan kebingungan dalam bersikap dan keterbukaan untuk masuk ke wilayah kedekatan satu sama lain.

Hasil sikap guru terhadap Pendidikan inklusi menunjukkan tidak banyak berbedanya sikap positif dan negatif, malah mengarah pada sikap negatif. Hal tersebut kemungkinan dipicu oleh kurangnya penambahan kompetensi guru dalam menghadapi siswa ABK yang sebenarnya menambah peran guru yang sejalan dengan penelitian dari Gaad & Khan (2007), guru merasa kurangnya keterampilan dan merasakan beban berat guna memenuhi kebutuhan siswa ABK. Dalam studi ini juga ditemukan bahwa sikap negatif juga masih cukup

ditunjukkan sehingga tidak jarang kasus mengenai siswa ABK mengalami hal kurang menyenangkan dan diskriminatif.

Meski demikian, dalam studi ini dapat dilihat juga bahwa sikap terhadap siswa ABK dan pendidikan inklusi mulai mengalami peningkatan terlihat dari sudah adanya guru atau siswa lain yang bersikap positif kepada siswa ABK. Kedepannya, sikap positif terhadap siswa ABK dan pendidikan inklusi diharapkan menjadi lebih meningkat. Siswa dan guru diharapkan lebih diberikan pengetahuan terkait dengan berbagai macam karakteristik siswa ABK dan bagaimana cara untuk bersikap dan memperlakukan mereka. Selain itu, guru juga diharapkan mendapatkan lebih banyak kompetensi untuk mengakomodir kebutuhan siswa ABK untuk dapat bersekolah.

6. Referensi

- Armstrong, R. W. (1986). *Attitudes Toward Disabled Children: A New Measure of Able-Bodied Children's Attitudes Toward Disabled Children*. [Doctoral's Thesis, McMaster University]. MacSphere. Retrieved from <https://macsphere.mcmaster.ca/bitstream/11375/5824/1/fulltext.pdf>
- Avramidis, E., Bayliss, P., & Burden, R. (2000). Student teachers' attitudes towards the inclusion of children with special educational needs in the ordinary school. *Teaching and teacher education*, 16(3), 277-293.
- Dewi, R. S. (2017). Pengaruh Pelatihan Efikasi Diri sebagai Pendidik terhadap Penurunan Burnout pada Guru di Sekolah Inklusi: Pengaruh Pelatihan Efikasi Diri sebagai Pendidik terhadap Penurunan Burnout pada Guru di Sekolah Inklusi. *Naturalistic: Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 1(2), 155-167.
- Doreen, R. U., & Kurniawati, F. (2018). Gender differences in attitude toward students with disabilities among primary students in Jakarta. *2nd INDOEDUC4ALL-Indonesian Education for All (INDOEDUC 2018)*. 272, pp. 1-4. Atlantis Press.
- Fajrianti, S. P., & Purwanti, M. (2021). The role of knowledge and attitude of regular students to acceptance toward special educational needs. *Journal of Educational, Health and Community Psychology*, 10(2), 275-289.
- Gaad, E., & Khan, L. (2007). Primary Mainstream Teachers' Attitudes towards Inclusion of Students with Special Educational Needs in the Private Sector: A Perspective from Dubai. *International Journal of Special Education*, 22(2), 95-109.
- Haekal, T. M. (2018). Peran Wali Kelas Dalam Pengelolaan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di SDN 1 Banda Aceh. (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Hasanah, U., Ni'matuzahroh, N., & Nurhamida, Y. (2016). Sikap siswa reguler terhadap siswa berkebutuhan khusus dengan kecenderungan *bullying* kelas inklusi. *Jurnal Psikologi Islam Al-Qalb*, 7(1), 43-58.
- Heyder, A., Suedkamp, A., & Steinmayr, R. (2020). How are teachers' attitudes toward inclusion related to the social-emotional school experiences of students with and without special educational needs?. *Learning and Individual Differences*, 77, 101776.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2022). *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- King, L. (2017). *The Science of Psychology: An Appreciative View* (4th ed.). McGraw-Hill Education.
- Mahat, M. (2008). The Development of a Psychometrically-Sound Instrument to Measure Teachers' Multidimensional Attitudes toward Inclusive Education. *International journal of special education*, 23(1), 82-92.
- Myers, D. G., & Twenge, J. M. (2016). *Social Psychology* (12th ed.). McGraw-Hill Education.
- Pemerintah Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 31 ayat 1 tentang hak mendapatkan Pendidikan*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Muzdalifah & Billah (2017) Pengaruh Efikasi pada Sikap Guru Terhadap Pendidikan Inklusif <https://www.researchgate.net/publication/321482206>
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2021). *Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru*. Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- Pardede, P. F. D., & Fernandes, R. (2020). Implementasi Pendidikan Inklusif di SMA Negeri 3 Bukittinggi. *Jurnal Perspektif*, 3(2), 272-278. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v3i2.237>
- Rahbini, R. (2012). Pendidikan Inklusif; Sebuah Konstruksi Pendidikan Anti Diskriminasi Bagi Difabel. *Jurnal Kependidikan Islam*, 2(1), 29-44. <https://jurnalftk.uinsby.ac.id/index.php/JKPI/article/download/1060/338>
- Santrock, J. W. (2019). *Life-Span Development* (17th ed.). McGraw-Hill Education.
- Salim, R. M., Jesslin, & Rumlatur, N. A. (2022). *Puppet book* membantu anak usia dini dalam memahami anak berkebutuhan khusus. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(6), 5769-5781. doi:10.31004/obsesi.v6i6.2975

- Salsabila, Q.A (2024) Pengaruh Persepsi Iklim Inklusi di Sekolah terhadap Sikap Siswa pada Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Menengah Jakarta. Skripsi : Universitas Negeri Jakarta.
- Sari, D. A., & Kurnia, I. (2022). Kenali pentingnya membangun pendidikan karakter pada anak berkebutuhan khusus (ABK) di sekolah reguler.
- Subban, P., & Sharma, U. (2006). Understanding educator attitudes toward the implementation of inclusive education. *Disability studies quarterly*, 25(2).
- Wang, Z., Xu, X., Han, Q., Chen, Y., Jiang, J., & Ni, G.-X. (2021). Factors associated with public attitudes towards persons with disabilities: a systematic review. *BMC Public Health*, 21(1058). Retrieved from <https://doi.org/10.1186/s12889-021-11139-3>
- Winarsih, M., Bintoro, T., & Nanik, U (2022). Pemberdayaan Guru Madrasah Ibtidaiyah dan Raudhatul Athfal dalam pelaksanaan Pendidikan Inklusif. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 13(1), 120-125